

BERDIRINYA UNIVERSITAS TERBUKA

Effendi Wahyono dan Setiyadi

Pengantar

Pendidikan jarak jauh pada tingkat pendidikan tinggi secara formal dimulai dengan berdirinya Universitas Terbuka (UT) pada 4 September 1984. Pembukaan UT dilatarbelakangi oleh adanya dua isu besar dalam dunia pendidikan di Indonesia, yaitu rendahnya mutu atau kualitas guru dan terbatasnya daya tampung pendidikan tinggi. Pada akhir dasawarsa tahun 1970-an banyak guru SLTP dan SLTA yang dididik secara darurat dalam bentuk program singkat, sehingga belum memenuhi standar kemampuan yang disyaratkan untuk mengajar di sekolah-sekolah pada tingkat pendidikan tersebut. Upaya untuk meningkatkan pendidikan guru (D-II untuk SLTP dan S-1 untuk SLTA) setelah mereka bekerja ternyata tidak mudah karena adanya kendala biaya dan waktu. Mereka harus meninggalkan tugas mengajarnya. Pada tahun 1981 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melaksanakan program pendidikan jarak jauh PGSLP D-II bagi guru sekolah

lanjutan tingkat pertama (SLP) yang telah memiliki ijazah D-I dan PGSLP. Program ini diberi nama Program Belajar Jarak Jauh Proyek Pengembangan Pendidikan Diploma Kependidikan. Proyek ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Untuk menyelenggarakan proses pendidikannya, dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Belajar Jarak Jauh di 12 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), yang meliputi:

1. IKIP Medan
2. IKIP Padang
3. Universitas Sriwijaya
4. IKIP Jakarta
5. IKIP Bandung
6. IKIP Semarang
7. Universitas Sebelas Maret
8. IKIP Yogyakarta
9. IKIP Surabaya
10. Universitas Udayana
11. IKIP Ujung Pandang
12. IKIP Malang

Pelaksanaan program belajar jarak jauh D-II untuk lulusan D-I dan PGSLP itu dimulai tahun ajaran 1982/1983. Pada tahun ini ditargetkan sekitar 2000 guru SLP dapat mengikuti pendidikan ke tingkat D-II dengan sistem belajar jarak jauh. Pelaksanaan pendidikan dilakukan dengan sistem rayonisasi. Pengembangan mata kuliah dilakukan menurut keunggulan masing-masing LPTK. Misalnya IKIP Medan sebagai UPR I yang mendapat tugas pengembangan program belajar jarak jauh bidang studi Olah Raga dan Kesehatan (Orkes) dan Pendidikan Keterampilan Keluarga (PKK) menggunakan mata kuliah matematika yang dikembangkan IKIP Yogyakarta, Bahasa Indonesia yang dikembangkan IKIP Padang, dan Bahasa Inggris yang dikem-

bangkan oleh IKIP Semarang. Bahan ajar untuk setiap mata kuliah dikembangkan secara moduler. Bantuan belajar atau tutorial diberikan di beberapa lokasi, umumnya di kota kabupaten atau propinsi. Tutor direkrut dari dosen LPTK dan guru-guru SLTA.

Tahun 1982 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi juga menyelenggarakan pendidikan jarak jauh Akta Mengajar V untuk meningkatkan kemampuan mengajar dosen perguruan tinggi. Pendidikan ini juga tidak menginduk pada salah satu perguruan tinggi, tetapi merupakan proyek Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Masalah lain adalah terdapat ledakan lulusan SLTA pada akhir Pelita IV yang besarnya mencapai 1,5 juta lulusan, sementara itu daya tampung perguruan tinggi negeri yang ada hanya sekitar 400 ribu. Dengan kondisi tersebut, diperkirakan terdapat sekitar 700 ribu lulusan SLTA yang tidak mendapatkan kesempatan belajar di perguruan tinggi. Untuk dapat menampung lulusan SLTA itu, perlu dibuat perencanaan daya tampung perguruan tinggi sampai 1,5 juta mahasiswa, dengan asumsi bahwa semua lulusan SLTA ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Penambahan daya tampung yang besar itu, di samping memerlukan ruangan yang cukup besar dengan dana yang tidak sedikit, akan menimbulkan masalah baru, yaitu penambahan tenaga pengajar yang diperkirakan akan mencapai 80.000 – 90.000 orang. Meskipun dana yang diperlukan untuk pengembangan dapat disediakan, penambahan 80.000 dosen sampai akhir Pelita IV (selama 5 tahun) tidak mungkin dapat dicapai (Direktorat Pembinaan Sarana Akademik, 1982: 6)

Pembentukan Panitia

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah memutuskan membuka sebuah universitas negeri yang sifatnya terbuka dengan sistem belajar jarak jauh. Keputusan itu diambil karena beberapa pertimbangan: *Pertama*, pendidikan jarak jauh tidak memerlukan dosen tetap dengan jumlah yang banyak. *Kedua*, sumber daya pendidikan tinggi yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk membantu penyelenggaraan sistem belajar jarak jauh tanpa mengganggu tugas pokok mereka. *Ketiga*, pendidikan jarak jauh tidak memerlukan banyak ruangan. *Keempat*, biaya pendidikan relatif lebih murah bila dibandingkan dengan pendidikan sistem tatap muka. *Kelima*, pendidikan jarak jauh dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi pendidikan. Melalui teknologi pendidikan, penyampaian pendidikan dapat dirancang dengan sedikit mungkin sumber daya manusia, tetapi dapat mengakibatkan terjadinya suasana dan kemauan belajar mahasiswa sehingga dapat mengakibatkan pula terjadinya suatu perubahan perilaku pada mahasiswa. Dengan demikian, melalui pemanfaatan media pendidikan, sistem belajar jarak jauh tidak berbeda kualitasnya dengan sistem belajar tatap muka. Kelebihannya, dengan menggunakan media cetak maupun elektronik (audio/video) sistem belajar jarak jauh dapat menjangkau lebih banyak mahasiswa dengan pelibatan staf pengajar yang jauh lebih sedikit karena dimensi ruang dan waktu tidak lagi menjadi penentu.

Atas dasar pertimbangan itu, pada akhir tahun 1981 pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan mendirikan sebuah universitas yang nonkonvensional dengan sistem terbuka yang diberi nama Universitas Terbuka Indonesia (*Indonesian Open University-IOU*) yang kemudian berubah namanya menjadi Universitas Terbuka (UT). Pelaksanaan perintisan pendirian UT ini dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri dari para ahli pendidikan

yang dipimpin oleh Prof. Dr. Setijadi yang waktu itu menjadi Pembantu Dekan II Fakultas Pascasarjana IKIP Jakarta (kini Universitas Negeri Jakarta). Pada bulan Oktober 1981 Draft Rencana Pembukaan UT selesai disusun. (Vahidi, 1982). Draft tersebut kemudian direvisi Juni 1982. Dalam rancangan itu, pada bulan Juni 1984 UT harus berdiri (Direktorat Pembinaan Sarana Akademik, 1982).

Populasi yang hendak dijangkau oleh UT adalah lulusan SLTA, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. Dengan demikian, mahasiswa UT secara umum dapat dikelompokkan menjadi:

1. Mahasiswa penuh, yaitu mereka yang kegiatan utamanya adalah belajar sebagai mahasiswa Universitas Terbuka.
2. Mahasiswa sampingan, yaitu mereka yang mempunyai pola kerja (sudah bekerja) disertai kuliah di Universitas Terbuka.
3. Mahasiswa sisipan, yaitu mereka yang telah menjadi mahasiswa pada lembaga pendidikan lain, tetapi untuk maksud-maksud tertentu menempuh satu atau beberapa mata kuliah pada Universitas Terbuka.

Tim perintis berdirinya UT sudah bekerja keras, tetapi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu memutuskan untuk menunda pembukaan UT. Dengan keputusan Menteri itu, nasib tim perintis tidak tentu. Tahun 1983 terjadi pergantian Kabinet Pembangunan sebagai kelanjutan dari hasil Pemilu 1982. Seperti halnya yang terjadi pada departemen lainnya, pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan terjadi pergantian menteri. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru, Prof. Dr. Nugroho setelah mempelajari tim perintisan pendirian UT, memutuskan untuk tetap meneruskan rencana Pendirian UT. Pada Oktober tahun 1983, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto secara resmi membentuk sebuah Panitia Persiapan Pendirian UT dengan susunan sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Dodi A. Tisna Amidjaja, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai Pengarah
2. Prof. Dr. Harsja W. Bachtiar, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Pengarah
3. Prof. Ir. S. Pramoetadi, Direktur Pembinaan Sarana Akademik sebagai Pengarah
4. Dr. Sunarjo, Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagai Konsultan
5. Ir. Willy Moenandir Mangoendiprodo, Direktur Utama Perusahaan Umum Telekomunikasi sebagai Konsultan
6. Drs. Hamdan Mansoer, Kepala Sub Direktorat Pembinaan Pengelolaan Kurikulum dan Perlengkapan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai Konsultan
7. Prof. Dr. Setijadi, Pembantu Dekan II Pascasarjana IKIP Jakarta sebagai Ketua
8. Prof. Dr. Sigit Moerjono, Pemimpin Proyek Pengembangan Institusi Pendidikan Tinggi sebagai Wakil Ketua
9. Dr. Moegiadi, M.A. Deputy Director Seameo sebagai Wakil Ketua
10. Prof. Dr. Sumadi Suryabrata, M.A., Ed.S., Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Pengujian Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Wakil Ketua.

Pada akhir November 1983 Menteri Pendidikan memanggil panitia untuk mendapatkan laporan perkembangan persiapan pendirian UT. Karena waktunya yang sempit, panitia mengajukan dua usulan: (a) menunda pembukaan UT selama satu tahun, atau (b) tetap membuka pada tahun ajaran 1984/1985 dengan segala kekurang-

annya. Jawaban Menteri atas usulan itu adalah tetap membuka UT pada tahun 1984/1985, dengan alasan, secara politis penundaan tersebut dapat merugikan citra pemerintah. Jika dalam pelaksanaannya terjadi kekurangan, dapat diperbaiki selama proses berlangsung.

Tujuan pemerintah mendirikan UT sebagaimana dirumuskan Tim Perintis Pendirian UT adalah memberikan kesempatan kepada para lulusan SLTA yang belum atau yang sudah bekerja, untuk mengikuti pelajaran pada tingkat pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Tujuan ini sesuai dengan asas belajar sepanjang hayat. Selain itu, UT juga diharapkan dapat menjadi wahana untuk mempertinggi mutu proses belajar-mengajar pada perguruan tinggi dengan jalan menggunakan bahan instruksional yang dikembangkan oleh UT dengan memanfaatkan dosen-dosen terbaik dari seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia. Dengan demikian, UT dapat dijadikan forum komunikasi dan pengembangan bahan instruksional yang baik, yang dapat dipergunakan oleh perguruan tinggi (Direktorat Pembinaan Sarana Akademis, 1982, 9-10).

Mempersiapkan sebuah universitas dengan sistem belajar jarak jauh ternyata bukan hal mudah. Panitia tidak memiliki pengalaman dalam pengelolaan pendidikan jarak jauh. Bagi dunia pendidikan di Indonesia, sistem pendidikan jarak jauh yang akan diselenggarakan UT merupakan hal yang baru. Studi ke berbagai universitas terbuka di luar negeri memang dilakukan. Sistem budaya dan kondisi geografi Indonesia yang berbeda membuat panitia tidak dapat mengadopsi begitu saja sistem belajar jarak jauh yang telah muncul lebih dulu di luar negeri, seperti Inggris. Padahal waktu yang diberikan panitia untuk mempersiapkan berdirinya UT tidak lama, hanya 10 bulan. Dalam waktu yang pendek itulah UT harus berdiri dan menerima mahasiswa baru.

Empat Komponen Sistem Dasar

Guna mendukung program kerjanya, panitia diberi kewenangan penuh untuk merekrut staf dan pegawai yang diperlukan. Perekrutan tenaga ahli dilakukan dengan memindahkan 80 orang dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, beberapa tenaga senior dari IKIP Jakarta dan UI. Perekrutan tenaga baru dilakukan melalui proses seleksi yang dilakukan secara bertahap, sehingga pada waktu diresmikan, UT telah memiliki 127 orang staf. Selain itu, panitia merasa perlu mengundang tim ahli dari lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan jarak jauh di beberapa negara untuk membantu menyusun perencanaan pengelolaan UT ke depan. Perencanaan UT yang meliputi susunan kampus, peralatan, program studi yang perlu dikembangkan, struktur organisasi UT, jumlah mahasiswa maksimal yang dapat dikelola, kebutuhan sumber daya manusia (kualifikasi dan keterampilannya) dilakukan dengan bantuan USAID dengan mengundang delapan tenaga ahli dari tiga negara yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Iran. CIDA dari Kanada juga mengirimkan tenaga ahlinya untuk membantu rencana pengembangan UT. Dengan bantuan tenaga ahli itulah berhasil disusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) UT yang ternyata dalam pelaksanaannya tidak dapat berfungsi sebagai rencana induk, tetapi hanya menjadi sumber ide pimpinan UT.

Nama "Universitas Terbuka" diinspirasi oleh *The Open University* di Inggris dan negara-negara lain yang mendirikan universitas sejenis. Istilah *terbuka* dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat lebih luas yang ingin melanjutkan pendidikannya pada tingkat pendidikan tinggi, karena salah satu ciri utama dari UT adalah keluwesannya. Tingkat keluwesan (fleksibilitas) yang disajikan oleh UT bukan hanya dalam hal sebaran tempat tinggal para mahasiswanya, tetapi juga terhadap latar

belakang pendidikan sebelumnya, terhadap rentang usia, terhadap pemilihan mata kuliah dan program studi, terhadap cara menjalani proses pembelajarannya, dan terhadap sasaran penyelesaian studinya. Namun, dalam masa persiapan, karena keterbatasan waktu dan sumber daya, panitia hanya menyiapkan sistem dasar operasional pendidikan jarak jauh yang meliputi empat komponen utama yaitu pengembangan bahan ajar dan ujian, pemberian bantuan belajar, pendistribusian bahan ajar, dan administrasi mahasiswa dalam jumlah besar.

Pengembangan bahan ajar dilakukan dengan sistem moduler. Setiap modul berisi materi pembelajaran (tercetak) dengan jumlah halaman antara 30-50 halaman, dilengkapi dengan buku kerja dengan berbagai latihan (termasuk bahan belajar suplemen), tes mandiri, latihan, panduan belajar, paket audio atau audio-visual, tes akhir mata kuliah, dan formulir umpan balik untuk evaluasi mahasiswa. Bahan ajar cetak yang moduler itu dibuat sedemikian rupa sehingga mudah untuk dipelajari secara mandiri (modul instruksional mandiri). Bahan ajar cetak itu disusun secara terpadu dengan program audio-visual, program tatap muka serta program praktikum. Dengan demikian, paket bahan ajar perlu dibuat oleh sebuah tim yang anggotanya terdiri atas dosen ahli materi bidang studi/ilmu, ahli instruksional, ahli media, ahli evaluasi, previewer materi, ahli bahasa, dan penyunting.

Selain tugas-tugas mandiri dan latihan sebagaimana yang disusun menyatu dengan bahan ajar moduler, UT dirancang juga untuk dapat mengadakan tes sumatif, ujian akhir semester, praktikum/pengalaman lapangan, dan ujian komprehensif. Ujian, baik ujian akhir semester maupun ujian komprehensif, didesain untuk dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa secara serempak di seluruh wilayah.

Disadari bahwa belajar mandiri bukan merupakan hal yang mudah. Dalam proses mempelajari bahan ajar, tentu terdapat mahasiswa yang mengalami kesulitan untuk memahami materi yang ada. Atas dasar pertimbangan itu, mahasiswa UT perlu diberi kesempatan secara tatap muka untuk memperoleh penjelasan langsung dari pembimbing (tutor). Pertemuan dapat dilakukan di kampus atau ditempat lain yang disepakati bersama oleh mahasiswa dan tutornya. Di samping tatap muka dengan tutor, UT memfasilitasi pertemuan antara mahasiswa dan dosen pembina sekali atau dua kali setelah mahasiswa mempelajari bahan ajar.

Registrasi atau penerimaan mahasiswa UT dapat dilakukan secara bersama-sama dan serentak di seluruh wilayah Indonesia. Pengadministrasian mahasiswa dalam jumlah besar tidak mungkin dilakukan secara manual, tetapi harus dibantu dengan komputer. Karena itu infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan registrasi mahasiswa dalam jumlah yang besar harus diadakan. Karena mahasiswa UT akan tersebar di seluruh wilayah, perlu juga disediakan infrastruktur untuk mendistribusikan bahan ajar kepada mahasiswa, baik membangun unit sendiri maupun bekerja sama dengan lembaga yang sudah ada.

Bentuk Organisasi

Untuk mendukung sistem tersebut dilakukan kerja sama dengan berbagai lembaga. Kerja sama dengan kantor pos dilakukan untuk melayani registrasi, distribusi bahan ajar, dan surat-menyurat antara mahasiswa dengan UT. Kerja sama dengan UI dilakukan untuk mengembangkan sistem pengelolaan registrasi dan ujian dengan komputer. Kerja sama dengan semua perguruan tinggi negeri dilakukan untuk mengembangkan cabang-cabang UT di daerah. Setiap perguruan tinggi negeri diminta menyediakan ruangan untuk

kantor UPBJJ dan menunjuk stafnya untuk menjadi kepala UPBJJ. Perguruan tinggi negeri setempat bertindak sebagai pembina UPBJJ. Ketiga jenis kerja sama itu sepenuhnya didukung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Berkat dukungan itu, kerja sama dapat berjalan dengan lancar.

Dengan melihat jaringan kerja sama seperti itu, organisasi UT sebagaimana dirumuskan Tim Perintis, harus merupakan jaringan kerja sama antara Pusat dan perguruan tinggi negeri penyelenggara di daerah. Organisasi di Pusat adalah unit pengelola umum, yang dipimpin oleh Rektor dan para Pembantu Rektor, yang fungsinya sama dengan fungsi Rektor dan Pembantu Rektor sebagaimana ditetapkan untuk perguruan tinggi konvensional. Demikian pula struktur organisasi di bawahnya, yaitu Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, dan Biro Administrasi Umum. Organisasi lainnya di bawah Rektor perlu disesuaikan dengan karakteristik sistem pendidikan jarak jauh, sehingga diperlukan unit-unit sebagai berikut:

- Bagian perencanaan dan pengembangan bahan ajar
- Bagian pembinaan pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar
- Bagian produksi dan distribusi bahan ajar
- Bagian penelitian dan evaluasi
- Bagian administrasi

Bagian perencanaan dan pengembangan bahan ajar bertugas mengkoordinasi penjabaran kurikulum sampai pada penulisan naskah dan pembuatan media lainnya yang siap diproduksi. Bagian pembinaan kegiatan belajar-mengajar bertugas menentukan perguruan tinggi yang akan melaksanakan kegiatan serta tenaga pelaksanaannya yang akan membantu pelaksanaan di lapangan. Bagian produksi dan distribusi bertanggung jawab pada pelaksanaan produksi dan

distribusi paket bahan ajar, sehingga dapat sampai di tempat sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Bagian ini juga bertugas menyediakan peralatan kegiatan belajar dan mengajar, termasuk buku-buku untuk perpustakaan di Pusat dan di perguruan tinggi penyelenggara (yang selanjutnya disebut Unit Program Belajar Jarak Jauh disingkat UPBJJ). Bagian penelitian dan evaluasi bertugas mengusahakan standarisasi evaluasi hasil belajar, mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi, menganalisis kebutuhan dan kemungkinan dibukanya program studi baru, dan melaksanakan uji coba paket bahan ajar. Bagian administrasi bertugas mengkoordinasi pelaksanaan registrasi, pelayanan staf di bidang administrasi umum dan administrasi akademik. Dalam struktur organisasi seperti ini fakultas tidak ada. Padahal, pada perguruan tinggi konvensional, fakultas merupakan komponen penting dalam perguruan tinggi.

UT Pusat adalah lembaga yang diberi wewenang untuk menentukan kualitas bahan ajar dan kegiatan belajar-mengajar yang diselenggarakan melalui sistem terbuka. UT Pusat juga diberi wewenang menentukan arah dan target pengembangan mahasiswa, dan pemberian ijazah.

Selain organisasi di Pusat, perlu pula disusun organisasi di perguruan tinggi penyelenggara di daerah. Unit-unit yang diperlukan pada organisasi UT di daerah adalah unit akademik, pelayanan, dan administrasi. Ketiga unit itu dapat digabung dalam sebuah Unit Pelaksana Teknis Belajar Jarak Jauh (UPT-BJJ), yang kemudian berubah menjadi Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ). Model organisasi seperti ini sebenarnya hampir sama dengan model pelaksanaan Belajar Jarak Jauh Proyek Pendidikan Tenaga Kependidikan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan pada 12 LPTK.

Struktur organisasi seperti itu ternyata tidak sesuai dengan acuan hukum yang ada, yang berlaku untuk perguruan tinggi konvensional. Di beberapa negara seperti Inggris dan Thailand, universitas terbuka didirikan dengan landasan hukum yang sangat tinggi, yaitu Undang-undang. Karena dasar hukumnya Undang-undang, struktur universitas terbuka di kedua negara itu tidak terikat oleh ketentuan yang berlaku dalam perguruan tinggi konvensional. Di Indonesia, perguruan tinggi negeri tidak dapat berdiri tanpa Keputusan Presiden. Meskipun Presiden telah menyetujui rencana pendirian UT, namun pelaksanaan teknis Keputusan Presiden harus dilaksanakan melalui Menteri Penertiban Aparatur Negara (Menpan) dan Sekretariat Negara (Setneg). Karena produk hukum yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Pemerintah tentang pendidikan tinggi yang ada hanya untuk perguruan tinggi konvensional, sulit dirumuskan bentuk organisasi khusus, yang dapat mendukung organisasi dan operasi UT. Waktu yang terlalu pendek tidak memungkinkan panitia mengusulkan sebuah Peraturan Pemerintah yang khusus untuk UT. Karena tidak ada acuan hukum yang khusus untuk UT, struktur organisasi UT didasarkan pada Peraturan Pemerintah untuk perguruan tinggi konvensional. Karena itulah dalam Keputusan Presiden No. 41 tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka pasal I ayat 2, struktur organisasi UT tidak didasarkan oleh struktur yang disusun panitia, tetapi susunannya adalah sebagai berikut:

- Rektor dan Pembantu Rektor
- Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
- Biro Administrasi Umum
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
- Fakultas Ekonomi
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
- Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

- Pusat Produksi Media Pendidikan, Informatika, dan Pengolahan Data
- Pusat Pengolahan Pengujian
- Unit Program Belajar Jarak Jauh.

Pengembangan Program Studi

Pengembangan program studi dilakukan melalui konsultasi dengan berbagai konsorsium pendidikan tinggi. Pemilihan program studi diprioritaskan yang memenuhi kebutuhan pembangunan, dan tidak memerlukan peralatan dan supervisi khusus yang sulit dilaksanakan dalam sistem belajar jarak jauh. Oleh karena, itu pembukaan program studi dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan dan kemampuan UT. Panitia membuat rencana pembukaan program studi untuk delapan tahun berikutnya, sampai tahun 1991. Rencana pembukaan program studi dapat dilihat dalam tabel 1 (Universitas Terbuka, 1984)

Tabel 1

Rencana Pengembangan Program Studi Universitas Terbuka selama delapan tahun

1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
Administrasi Negara	Manajemen	Penyelidikan Operasional	Hubungan Masyarakat	Pendidikan Anak	Geologi	Pertanian	Ilmu Tanah
Administrasi Niaga	Manajemen Industri	Psikologi Perkembangan	Sosiologi	Sejarah Indonesia	Biologi	Perikanan	Agronomi
Ekonomi Pembangunan	Akuntansi	Psikologi Sosial	Kesejahteraan Sosial	Hubungan Internasional	Fisika	Kehutanan	Kesehatan Lingkungan
Statistik	Administrasi Pembangunan	Psikologi Industri dan Organisasi	Ilmu Politik	Bahasa Indonesia	Kimia	Peternakan	Kesehatan Masyarakat
	Perpajakan	Administrasi dan Supervisi Pendidikan	Hukum	Bahasa Inggris		Teknik Sipil	Farmasi
	Matematika Terapan	Teknologi Pendidikan	Pendidikan Bisnis	Komunikasi		Teknik Mesin	Kedokteran
	Perpustakaan	Komputer	Bimbingan dan Penyuluhan	Psikologi Pendidikan		Teknik Kimia	Kedokteran Gigi
	Ekonomi Pertanian	Arsitektur				Teknik Elektronika	Kedokteran Hewan

Sesuai dengan rencana, pada tahun pertama dibuka empat program studi S1, yaitu administrasi negara, administrasi niaga, ekonomi dan studi pembangunan, dan statistika. Jenis program studi lainnya, yaitu program pendidikan merupakan pengambilalihan tugas Proyek Pendidikan Guru melalui Belajar Jarak Jauh dengan kurikulum dan bahan ajar yang disusun baru. Demikian pula dengan program Akta V yang diambil alih dari proyek yang sudah ada. Proses pengembangan program studi dimulai dengan penyusunan kurikulum yang mengacu pada kurikulum inti, kemudian dilanjutkan dengan penulisan bahan ajar. Berbagai ahli dari berbagai perguruan tinggi negeri seperti UI, ITB, UGM, Undip, IKIP Jakarta, dan IKIP Bandung dilibatkan dalam proses penulisan bahan ajar.

Peresmian Universitas Terbuka

Sejak awal kegiatan menyiapkan pembukaan, proses penerimaan mahasiswa, hingga peresmian berdirinya, UT tidak memiliki kantor sendiri secara permanen. Untuk mendapatkan ruangan yang layak untuk bekerja, Panitia mengadakan negosiasi dengan pihak IKIP Jakarta sehingga UT berhasil mendapatkan pinjaman dua lantai dari gedung Pusat Sumber Belajar milik IKIP Jakarta yang terletak di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur. Gedung inilah yang dijadikan kantor sementara kegiatan UT. Namun, karena gedung ini tidak dapat menampung seluruh kegiatan UT, beberapa unit ditiptkan di beberapa kantor pemerintah lainnya, seperti Distribusi bahan ajar ditiptkan pada kantor Pusat Pembinaan Bahasa yang terletak tidak jauh dari kantor UT Pusat sementara, dan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bekerja pada sebuah ruangan kantor milik Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang terletak di Jalan Hang Lekir, Jakarta Selatan.

Selain fasilitas fisik, masalah lain yang dihadapi Panitia adalah anggaran. Karena pembentukan Panitia pendirian UT di tengah-tengah tahun anggaran, kegiatan persiapan berdirinya UT tidak dianggarkan dalam APBN. Berkat dukungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan BAPPENAS, sejumlah anggaran dapat disisihkan untuk UT. Meskipun menghadapi berbagai masalah, Panitia tetap bekerja keras hingga lahirlah UT dengan selamat.

Pada tanggal 4 September 1984, UT resmi berdiri. Peresmian berdirinya UT dilakukan oleh Presiden Suharto di Bina Graha. Dalam acara peresmian itu, diselenggarakan pula kuliah perdana yang diberikan oleh Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo. Kuliah perdana ini dipancarkan ke seluruh penjuru Tanah Air melalui TVRI dan RRI. Hari berikutnya bertempat di kantor Pendidikan dan Kebudayaan Senayan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto melantik Rektor UT, Prof. Dr. Setijadi.

Visi, Misi dan Kebijakan ke-1: Lahir dengan Selamat

Visi dan misi Rektor pendiri, sejak menjadi Ketua Panitia Pelaksana Berdirinya UT adalah sama dengan yang tercantum pada Keputusan Presiden, yaitu melahirkan suatu Perguruan Tinggi Jarak Jauh (PTJJ) yang dapat menampung para lulusan SLTA, yang jumlahnya sangat banyak, yang tidak dapat diterima di perguruan tinggi konvensional. Kecuali itu UT juga dimaksudkan untuk mendidik guru dan pekerja lainnya yang perlu ditingkatkan kemampuannya. Dengan mendirikan PTJJ, maka (a) tidak diperlukan dosen tetap dalam jumlah yang banyak, (b) tidak diperlukan kampus baru kecuali untuk para pengelolanya, (c) fasilitas perguruan tinggi yang tersedia dapat digunakan tanpa mengganggu tugas pokoknya, (d) dapat ditampung

mahasiswa dalam jumlah yang banyak, dan (e) relatif murah biayanya, baik bagi pemerintah maupun bagi mahasiswanya.

Dengan demikian, visi dan misi itu ditekankan kepada lahirnya sebuah PTJJ yang dapat menampung banyak mahasiswa dengan selamat. Apapun kekurangan-kekurangannya dapat diisi selama proses berlangsung. Yang penting PTJJ tersebut mendapatkan mahasiswa, dapat menyelenggarakan pendidikan jarak jauh dan dapat menyelenggarakan ujian.

Untuk mendukung visi dan misi tersebut, dibuatlah berbagai kebijakan sebagai berikut.

1. *Merancang sistem operasi yang sangat sederhana sehingga dapat dilaksanakan oleh staf yang ada.*

Kebijakan ini ditempuh karena bila sistem operasi terlalu rumit, dengan kemampuan UT yang belum teruji pada saat UT baru berdiri dan dengan segala kekurangannya, UT jelas tidak dapat berfungsi. Apalagi pada tahun pertama saja UT sudah menampung sekitar 54.000 mahasiswa. Jadi pada saat berdirinya, UT sudah menjadi perguruan tinggi terbesar, ditinjau dari segi jumlah mahasiswanya, dibandingkan dengan perguruan tinggi di Indonesia lainnya. Sistem operasi ini meliputi unsur-unsur registrasi, pembayaran SPP, distribusi bahan ajar, tutorial dan ujian.

Registrasi, pembayaran SPP, dan distribusi dilakukan melalui kantor pos. Karena kurikulum dirancang tanpa pilihan (dalam bentuk paket), pada setiap semester sejumlah tertentu bahan ajar sudah dapat dibungkus (dipak) dan disimpan di berbagai kantor pos di seluruh Indonesia. Paket bahan ajar itu dapat langsung diberikan kepada mahasiswa setelah mereka mengisi formulir registrasi dan membayar SPP. Dengan demikian mahasiswa, dengan sekali, atau paling banyak dua kali pergi ke kantor pos,

semua keperluan registrasi, pembayaran SPP dan bahan ajar, sudah dapat terpenuhi.

Tutorial hanya dilakukan di tempat-tempat tertentu yang tersedia tutornya. Hal ini memang sangat membatasi pelayanan tutorial kepada mahasiswa, namun pada waktu itu tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh mengingat terbatasnya tutor yang berkualitas, terutama di daerah.

Ujian dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru) yang sudah dikenal oleh sebagian staf UT, terutama mereka yang berada di UPBJJ setempat.

2. *Meminta berbagai lembaga yang dapat mendukung terlaksananya misi UT.*

Lembaga-lembaga yang diminta kerja sama dan perannya dalam mengembangkan UT adalah sebagai berikut.

a. *Universitas Indonesia*

Pusat Ilmu Komputer (Pusilkom) Universitas Indonesia adalah lembaga yang sangat menentukan dalam membantu sistem operasi UT. Lembaga tersebut memberikan pelayanan komputer mini untuk semua keperluan pencatatan data mahasiswa, sebelum UT mempunyai sendiri komputer yang memadai. Pusilkom juga membantu UT dalam mendesain perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan UT, membantu dengan latihan-latihan yang diperlukan, dan membantu dalam mendapatkan akses data Sipenmaru untuk merekrut mahasiswa UT. Tanpa bantuan Pusilkom UI, UT tidak akan dapat menampung begitu banyak mahasiswa pada tahun pertama.

b. *Perguruan Tinggi lainnya*

Semua perguruan tinggi negeri, kecuali satu, memberikan bantuan kepada UT dalam menyediakan tempat dan memberikan staf untuk keperluan kantor UPBJJ. Tanpa bantuan ini, jangkauan UT pada tahun-tahun pertama akan sangat terbatas. Para Rektor perguruan tinggi tersebut juga menjadi Pembina UPBJJ, suatu tugas yang pelaksanaannya kadang-kadang kurang dimengerti.

Beberapa perguruan tinggi negeri yang terbaik juga meminjamkan staf pengajarnya yang terpilih untuk menulis bahan ajar UT, dan untuk menduduki beberapa jabatan pimpinan (Pembantu Rektor, Dekan dan Pembantu Dekan) di UT.

c. *Perum Pos dan Giro*

Tugas-tugas Kantor Pos untuk membantu UT ialah: (a) melayani pendaftaran mahasiswa dengan menjual formulir pendaftaran untuk kemudian mengirimkan formulir yang sudah diisi ke UT Pusat; (b) mendistribusikan bahan ajar mahasiswa dengan cara, mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran, mengambil bahan ajar di kantor pos yang ditunjuk; (c) melayani pembayaran SPP dan melaporkannya ke UT pusat; dan (d) melayani segala jenis surat-menyurat antara mahasiswa dan UT. Tugas-tugas tersebut dapat dijalankan dengan baik.

d. *Lembaga Kemasyarakatan*

Lembaga kemasyarakatan yang mampu diajak membantu mendirikan pusat-pusat tutorial bagi mahasiswa UT. Pada permulaannya banyak perguruan tinggi swasta yang kecil, mendaftarkan mahasiswanya ke UT, sehingga bila lulus dari UT, mahasiswa tersebut mendapatkan ijazah rangkap, dari perguruan tinggi mereka sendiri dan dari UT. Daya tarik

untuk mendapatkan ijazah dari UT cukup besar, karena ijazah tersebut adalah ijazah negeri yang diakui oleh negara, sedangkan ijazah perguruan tinggi swasta yang belum terkenal, apalagi belum mendapatkan pengakuan dari Ditjen Dikti, sulit untuk memperoleh pengakuan, baik oleh lembaga swasta maupun oleh pemerintah. Kemudian beberapa lembaga swasta mendirikan pusat studi (tutorial) yang memberikan berbagai layanan kepada mahasiswa UT, terutama layanan tutorial. Sungguh disayangkan, pusat-pusat ini kemudian berhenti karena tidak laku atau merugi.

e. *Lembaga Siaran*

Siaran perkuliahan UT melalui televisi dapat berjalan melalui kerja sama dengan TVRI dengan jam siaran dua kali dalam sebulan. Penambahan jam siaran tidak dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, TVRI sulit memberikan tambahan jam siaran, karena permintaan yang banyak dari instansi-instansi lain, yang perlu juga dipenuhi. *Kedua*, UT tidak mempunyai anggaran yang cukup untuk memproduksi lebih dari dua kali sebulan. Di kemudian hari kerja sama juga ditambah dengan Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) yang memberi kesempatan kepada UT untuk menyiarkan kuliahnya melalui TPI. Kerja sama ini sangat menguntungkan UT karena produksi program sebagian terbesar dibiayai oleh TPI. Tanpa subsidi dari TPI atau Pemerintah, anggaran UT tidak akan mampu mendukung produksi program televisi lebih dari dua kali sebulan. Produksi program televisi untuk TPI dibuat dua kali 25 menit per minggu. Pada waktu itu ada harapan bahwa frekuensi siaran akan ditambah di masa mendatang. Untuk itu sebuah Pusat Produksi Media dibangun lengkap dengan gedung studio dan peralatannya. Akan tetapi bagaimana-

pun, siaran televisi sangat mahal, sehingga tanpa subsidi yang cukup besar, tidak mungkin UT menyelenggarakan siaran televisi untuk menyampaikan bahan ajarnya. Yang paling mungkin adalah menyelenggarakan siaran televisi sebagai iklan bahwa ada PTJJ yang bernama UT, dan bahwa UT membuka diri bagi pendidikan jarak jauh bagi siapa saja yang memerlukannya. Yang dapat dikembangkan dengan lebih leluasa adalah program siaran radio, yang disiarkan melalui RRI Pusat dan daerah maupun melalui siaran radio swasta setempat. Sayangnya, sampai kini rencana pemerintah untuk membangun studio siaran khusus bagi pendidikan belum juga terlaksana

3. *Merancang program studi yang terbatas dan kurikulum yang seragam, untuk setiap program studi, tanpa memberi pilihan mata kuliah yang berbeda.*

Untuk tahap awal, yang dirancang hanyalah empat program studi S1 nonkependidikan, yaitu

- a. Administrasi Negara;
- b. Administrasi Niaga;
- c. Ekonomi dan Studi Pembangunan; dan
- d. Statistika Terapan.

Rancangan kurikulumnya dibuat sederhana, dengan mengutip dan mengubah sedikit kurikulum yang ada, kemudian menyusun Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) nya. GBPP ini kemudian dipergunakan sebagai arahan penulis modul. Kurikulum seragam ini sangat memudahkan sistem pencatatan dan operasi UT. Pada tahap ini tidak ada pilihan mata kuliah dan setiap mahasiswa harus mengambil kurikulum yang sama untuk setiap program studi.

4. *Merekrut mahasiswa berdasarkan data Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru*

Pendaftaran dilakukan melalui dua jalur, yaitu (1) mendaftar langsung ke UT bagi mereka yang tidak lagi memiliki kesempatan mengikuti Sipenmaru, dan (2) mendaftar melalui Sipenmaru. Daftar calon mahasiswa yang mengikuti Sipenmaru, yang tidak diterima di perguruan tinggi negeri, dapat dengan mudah diperoleh dari Universitas Indonesia. Terdapat sekitar 120.000 nama yang terseleksi untuk kemudian dipanggil 65.000 orang untuk mendaftar di UT. Pada akhirnya sekitar 54.000 orang mendaftar menjadi mahasiswa UT.

5. *Memakai perangkat lunak Sipenmaru untuk registrasi mahasiswa.*

Perangkat lunak Sipenmaru yang dibuat oleh Pusat Ilmu Komputer UI dapat dipergunakan pula untuk registrasi mahasiswa UT. Dengan bantuan kepala dan staf Pusikom-UI, staf UT diperkenalkan dan dilatih untuk menggunakan sendiri perangkat lunak tersebut. Setelah kurikulum tidak lagi dibuat seragam, perangkat lunak tersebut disesuaikan dengan kebutuhan baru UT. Tanpa bantuan dari Pusat Komputer UI, UT akan sukar untuk melaksanakan registrasi sejumlah besar mahasiswa yang mendaftar pada tahun-tahun permulaan berdirinya UT.

6. *Meminjam komputer Universitas Indonesia untuk memproses data mahasiswa UT, sebelum UT dapat membeli sendiri komputer mini yang diperlukan.*

Karena UT pada tahun-tahun pertama belum mempunyai komputer yang sesuai (komputer mini), maka dengan bekerja sama dengan UI yang sangat baik, UT diperbolehkan memproses data mahasiswanya di Pusikom-UI. Baru pada tahun

ketiga, UT dapat membeli sendiri komputer mini yang kemudian dikembangkan dengan bimbingan Pusilkom-UI.

7. *Mengembangkan UT sebagai universitas pengelola.*

Mencari dosen yang sudah mempunyai kemampuan untuk menjadi pengampu mata kuliah dari enam program studi yang dibuka pada saat UT berdiri sangat sulit, karena hal itu berarti harus memindahkannya dari perguruan tinggi yang ada, dan sudah lebih terkenal, ke UT. Karena itulah UT dikembangkan menjadi perguruan tinggi pengelola, artinya UT harus pandai mengelola tenaga akademik dari perguruan tinggi lain untuk dapat menulis bahan ajar dan bahan ujian bagi UT. (Peminjaman tenaga akademik ke perguruan tinggi lain hingga sekarang masih berlanjut).

Kebijakan ini mempunyai konsekuensi yang cukup berat bagi sebagian staf pengajar UT. Banyak di antara mereka yang mendapatkan pendidikan dan latihan lanjutan yang tidak pada bidang studi S-1-nya, akan tetapi pada bidang studi yang berkaitan dengan PTJJ dan pengelolaan PTJJ. Hal ini berarti bahwa mereka harus meninggalkan bidang studi semula untuk memperdalam bidang yang baru. Kenaikan pangkat mereka terganggu bilamana mereka tetap bekerja pada fakultas di luar FKIP. Hal ini disebabkan aturan kenaikan pangkat mengikuti aturan perguruan tinggi konvensional. Baru kemudian UT diperbolehkan membuat aturan tersendiri bagi kenaikan staf akademiknya, itupun masih dibatasi aturan umum yang masih menyulitkan staf akademik di luar FKIP.

Simpulan

Secara resmi, Panitia Berdirinya UT terbentuk pada bulan Oktober 1983 dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0464/P/1983 tentang Pembentukan Panitia Persiapan Pendirian Universitas Terbuka. Pada tanggal 4 September 1984, UT diresmikan oleh Presiden Suharto di Bina Graha. UT berdiri berdasarkan Keputusan Presiden No. 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka. Karena persiapannya yang hanya kurang lebih 10 bulan, dalam perjalanannya pada tahun pertama UT menghadapi berbagai masalah, terutama disebabkan oleh struktur organisasinya yang mengacu pada perguruan tinggi konvensional dan tidak sesuai dengan karakteristik pendidikan jarak jauh. UT perlu dikembangkan dengan struktur organisasi yang sesuai dengan karakteristik pendidikan jarak jauh. Mengacu pada Undang-undang Pendidikan Nasional pasal 31 ayat 4, perlu diadakan Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan pendidikan jarak jauh yang berbeda dengan pendidikan konvensional. □

Daftar Pustaka

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 1984. 'Proceeding of the seminar on Indonesiaan Open University (January 16th, 1984)'. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 1983. 'Laporan penyelenggaraan program belajar jarak jauh di 12 LPTK'. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Direktorat Pembinaan Sarana Akademis, 1982. 'Konsep rancangan Universitas Terbuka' (draft tidak diterbitkan). Jakarta: Direktorat Pembinaan Sarana Akademis.

- Suparman, A., 1989. *Pendidikan Jarak Jauh: Konsep dan Peranannya dalam Memecahkan Masalah Pendidikan* (Pidato ilmiah disampaikan dalam rapat Senat terbuka pada upacara lustrum I dan wisuda Universitas Terbuka), Jakarta: Universitas Terbuka.
- Universitas Terbuka, 2000. *Laporan Evaluasi Diri Universitas Terbuka*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Universitas Terbuka, 1984. *Universitas Terbuka: initial planning considerations*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Universitas Terbuka, 1989. *Lima Tahun Universitas Terbuka*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Universitas Terbuka, 1994. *Universitas Terbuka: Sebuah Inovasi dalam Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Universitas Terbuka, 1999. *Lima belas tahun Universitas Terbuka*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Vahidi, B. 1982. 'Operational planning for the Indonesian Open University (an open-ended report)'. Jakarta: Consultant of the Educational Communication Development Project.